PERSYARATAN DASAR PEMEKARAN WILAYAH PAMEKASAN DALAM UPAYA MENDUKUNG PEMBENTUKAN PROVINSI MADURA

¹⁾Farahdilla Kutsiyah, ²⁾Abdurahman, ³⁾Rahman Hakim, ⁴⁾Ainur Rahman

¹⁾IAIN Madura

²⁾Universitas Madura

³⁾Universitas Madura

⁴⁾IAIN Madura

keindahanmaduraku@gmail.com

Abstrak

Jumlah kabupaten di Pulau Madura ada empat, sementara merujuk UU RI Nomor 23/2014 tentang otonomi daerah bahwa syarat pembentukan provinsi baru harus memiliki lima kabupaten atau kota. Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan. Hasil yang diperoleh (1)Pemekaran wilayah Pamekasan sebagian besar memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana tercantum dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2014, terkecuali pada aspek keuangan daerah yakni angka ketergantungan fiskal masih relatif tinggi (> 60%). Adapun yang mendasari perlunya pemekaran: selama ini masih terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah bagian utara dengan bagian selatan; laju pertumbuhan pembangunan Madura lebih lambat dari rata-rata kabupaten lain di Jatim; Madura memiliki kekhasan sosial budaya; potensi sumber daya alam, anggaran, dan sumber daya manusia di Madura bila dikelola dengan baik dapat menjadi modal penting bagi implementasi pembentukan provinsi Madura, dan wilayah yang paling siap untuk penambahan kota atau kabupaten adalah wilayah Pamekasan (2)Pemekaran wilayah pamekasan dapat diterapkan dengan membagi wilayah ini menjadi Kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan. Plot untuk Kota Pamekasan bisa meliputi lima kecamatan: Pamekasan, Pademawu, Larangan; Tlanakan dan Galis. Sementara plot untuk Kabupaten Pamekasan meliputi delapan kecamatan: Proppo, Waru, Kadur, Pasean, Batumarmar, Pegantenan, Pakong dan Palengaan.

Kata Kunci: Pemekaran, wilayah Pamekasan

Abstract

Madura Island has four districts, while referring to Law 23/2014 on regional autonomy, the requirement for the formation of a new province must have five districts or cities. This research is included in the category of library research. The results obtained (1) The expansion of the Pamekasan region fulfills the basic regional requirements and the basic requirements for regional capacity as stated in the Republic of Indonesia Law Number 23 of 2014, with the exception of the regional financial aspects. This is reflected in the relatively high fiscal dependence rate (> 60%). The underlying factors are: there is still an imbalance of development between the northern and southern regions; Madura development growth rate is slower than the average of other districts in East Java; Madura has socio-cultural characteristics compared to districts / cities in East Java; if the potential of natural resources, budget, and human resources in Madura is managed well it can be an important capital for the implementation of Madura province formation; and the most ready area for additional cities or districts is the Pamekasan region (2) The expansion of these can be implemented by dividing into Pamekasan City and Pamekasan Regency. Pamekasan city could cover five sub-districts: Pamekasan, Pademawu, Larangan; Tlanakan and Galis. Meanwhile Pamekasan Regency covers eight sub-districts: Proppo, Waru, Kadur, Pasean, Batumarmar, Pegantenan, Pakong and Palengaan.

Keywords : Regional expansion, Pamekasan area

A. PENDAHULUAN

Pemekaran daerah kabupaten/kota menjadi beberapa daerah kabupaten baru, pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Ubaedillah et al., 2014). Ini artinya pemekaran daerah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian dan perkembangan antar sektor, memperkuat integrasi nasional (Ali et al., 2018). Oleh karena, pemekaran akan mempersingkat rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, khususnya pada wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh fasilitas pemerintahan dan juga diaspirasikan untuk memperbaiki pemerataan pembangunan (Ida 2005).

Alasan utama daerah mengajukan usul pemekaran: pertama, kebutuhan untuk pemerataan ekonomi daerah. Kedua, kondisi geografis yang terlalu luas. Ketiga, perbedaan basis identitas (etnis, asal muasal keturunan). Keempat, kegagalan pengelolaan konflik komunal. Terakhir, adanya insentif fiskal yang dijamin oleh Undang-Undang bagi daerah-daerah baru hasil pemekaran melalui Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil sumberdaya alam, dan pendapatan asli daerah (Putra, 2006; Pratikno, 2007).

Hasil BPHN & UNDP (2007; Bappenas, 2004) kesejahteraan masyarakat, secara umum mengalami peningkatan dengan adanya pemekaran. Widada et al, (2014) rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota hasil pemekaran selama periode 2008-2010 yang diindikasikan dari angka rata-rata PDRB kabupaten/kota hasil pemekaran menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun. Bahkan di saat laju PDB nasional mengalami penurunan di tahun 2009, laju rata-rata PDRB kabupaten/kota hasil pemekaran masih tetap positif.

Kabupaten Pamekasan sebagai bagian dari Pulau Madura, dengan karakteristik: sebagai pulau seribu pesantren, artinya sub culture pesantren terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat khususnya di Pedesaan (Kutsiyah, 2020). Selain itu Madura memiliki kekhasan sosial budaya yang berbeda dibandingkan dari kabupaten/kota di Jatim pada umumnya. Kedua, ekologi tegal mendominasi wajah pertanian di Pulau Madura (Kuntowidjoyo, 2017; BPS, 2019). Ketiga, wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa timur serta pertumbuhan

ekonomi lambat (BPS, 2013-2019). Tauran et al. (2017) potensi sumber daya alam, anggaran, dan sumber daya manusia di Madura bila dikelola dengan baik dapat menjadi modal penting bagi implementasi wacana provinsi Madura.

Sebagaimana dalam UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa Pembentukan Daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Jumlah kabupaten di Pulau Madura ada empat, padahal merujuk UU 23/2014 tentang otonomi daerah dan PP Nomor 78/2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah mengatur bahwa syarat pembentukan provinsi baru harus memiliki lima kabupaten atau kota. Oleh karena itu Pulau Madura memerlukan tambahan satu kabupaten atau kota supaya memenuhi syarat material kewilayahan membentuk provinsi Madura. Wilayah Pamekasan dianggap paling siap untuk penambahan kota atau kabupaten.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pemekaran wilayah Pamekasan ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Pemekaran berarti pemecahan daerah yang telah ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kriteria yang telah dipenuhi oleh daerah tersebut. Cakupan wilayah paling sedikit empat Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota. Sementara untuk pembentukan daerah kabupaten paling sedikit lima Kecamatan. Berdasar perundangan tersebut, pemekaran wilayah Pamekasan dapat diterapkan dengan membagi wilayah ini menjadi Kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan.

1. Faktor-Faktor yang Mendasari Pemekaran Wilayah Pamekasan.

Faktor-faktor yang mendasari pemekaran wilayah Pamekasan: Pertama, selama ini masih terjadi ketimpangan pembangunan antara wilayah bagian utara dengan wilayah bagian selatan baik dari aspek pelayanan publik, pendidikan, dan ekonomi. Lubis (2015) Pulau Madura yang

kondisi geografisnya kurang subur, terutama di pesisir utara serta karakteristik penduduknya yang agamis dengan pertumbuhan ekonomi wilayah rata-rata rendah (2-4 persen per tahun). Dengan pemekaran ini, diharapkan kedua wilayah bagian utara dan wilayah bagian tengah mempunyai peluang untuk lebih diperhatikan dan keluar dari ketertinggalan. BPHN (2009) Oleh karena menjadi daerah otonom maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun wilayah tersebut. Ali et al. (2018) pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah.

Kedua, potensi sumber daya alam, anggaran, dan sumber daya manusia di Madura bila dikelola dengan baik dapat menjadi modal penting bagi implementasi wacana provinsi Madura. Madura dikenal sebagai salah satu lumbung nasional produksi garam, produksi sapi, tembakau hingga pertambangan minyak bumi. Di sisi lain, kelemahan yang tampak di Madura dalam pembentukan Pemerintah Provinsi Madura saat ini adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi, kemampuan anggaran, kemampuan pelayanan sosial, indeks pembangunan manusia, dan koordinasi antar pemerintah kabupaten di wilayah Madura (Tauran et al., 2017).

Pulau Madura terdiri atas empat kabupaten padahal merujuk UU 23/2014 tentang pemerintah daerah dan PP Nomor 78/2007 bahwa syarat pembentukan provinsi baru harus memiliki lima kabupaten atau kota. Oleh karena itu Pulau Madura memerlukan tambahan satu kabupaten atau kota supaya memenuhi syarat material kewilayahan membentuk provinsi Madura. Wilayah yang paling siap untuk penambahan kota atau kabupaten adalah wilayah Pamekasan.

Ketiga, laju pertumbuhan pembangunan Madura lebih lambat dari rata-rata kabupaten lain di Jatim. Sejak masa Belanda Pulau Madura tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain di Pulau Jawa, dan berlanjut hingga saat ini, Kabupaten yang ada di Pulau Madura menduduki daerah dengan urutan tertinggi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa timur, dan IPM lebih rendah dari rata-rata Jawa timur.

Prosentase kemiskinan tertinggi di Jawa timur diduduki 4 kabupaten di Madura

merupakan tertinggi di antara kabupaten lain di Jawa timur (BPS, 2008; 2013; 2020), dengan laju pertumbuhan pembangunan Madura relatif lebih lambat dari rata-rata kabupaten lain di Jatim (Lubis, 2015). Qurratu'ain et al., (2016) persentase penduduk miskin yang cenderung tinggi di Pulau Madura selama kurun waktu 10 tahun dari tahun 2005 hingga 2014, tidak terjadi peningkatan yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan oleh masing-masing pemerintah daerah tersebut.

Keempat, Madura memiliki kekhasan sosial budaya dibandingkan dari kabupaten/kota di Jatim pada umumnya. Bahkan, sejarah menunjukkan sejak zaman kolonial Belanda, Madura pernah menjadi negara tersendiri, Kemudian pada tahun 1955 Madura baru digabung ke dalam daerah provinsi Jatim (Tauran et al., 2017; Arsip Kementrian Penerangan, No. 99). Merujuk Kuntowidjoyo (2017) ekotipe tegal di Madura sangat berbeda dengan ekotipe sawah di Jawa. Pola desa di Madura adalah hasil dari lingkungan tegal. Implikasi dari langkanya suplai bahan-bahan makanan ialah tidak dapat mendukung unit keluarga besar selain keluarga inti. Tanah pertanian yang kurang dan jarangunya makanan di Madura. Ekologi tegal yang membentuk pola pemukiman penduduk, membuat desa di Madura tidak mengenal batas-batas kewilayahan, tetapi suatu percampuran unit-unit kecil atau dusun-dusun yang masing-masing dibentuk dari beberapa keluarga. Madura kurang memiliki solidaritas desa, meskipun di sana terdapat homogenitas kultural dan religius. Sistem kedudukan tanah di Madura tidak mengenal tanah komunal karena sejak dulu kala Madura mengalami kekurangan tanah, sehingga pemilikan individual lebih disukai. Hubungan sosial di Madura "berpusat pada individual", dengan keluarga inti sebagai unit dasarnya.

Orang Madura miskin dalam usaha pemaknaan masyarakat, seperti seni, bahasa, sastra, dan bentuk-bentuk simbolisasi lainnya. Miskinnya dunia simbolik itu terlihat juga dalam ketidakhadiran gerakan millenarisme dan bentuk-bentuk gerakan eskatologis lainnya. Hal itu mungkin karena cara kehidupan keagamaan masyarakat tani di Madura adalah utilitarian dan moralistik, dibanding dengan orang Jawa yang penuh dengan mistik dan mite. (Kuntowidjoyo, 2017).

Dimensi sosial, kultural, bisa dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai

beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultural terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru (Kana & Suwondo, 2007). Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintah nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Namun demikian, kebijakan pemekaran juga bisa memicu konflik antar masyarakat, antar pemerintah daerah yang pada gilirannya juga menimbulkan masalah konflik horisontal dalam masyarakat (BPHN, 2009)

Kelima, pertumbuhan ekonomi dan IPM Kabupaten Pamekasan lebih baik dari dua kabupaten lainnya. Hasil penelitian Sari et al., Kabupaten Sampang, IPM nya menempati posisi terendah di Jawa Timur. Hasil ini berbeda dari penelitian yang dilakukan pada kurun waktu 2005-2009. Dengan analisis tipologi kelas Pulau Madura diklasifikasikan menjadi empat pola pertumbuhan ekonomi yaitu: daerah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu kabupaten Bangkalan. Daerah berkembang cepat yakni Kabupaten Pamekasan. Daerah maju tetapi tertekan adalah Kabupaten Sumenep, dan Kabupaten Sampang adalah daerah relatif tertinggal (Nur, 2011).

Keenam, Kesiapan DPRD Kabupaten Pamekasan tentang pemekaran wilayah Pamekasan menjadi kota Pamekasan dan Kabupaten Pamekasan. Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman mengatakan, menjadikan Madura menjadi provinsi merupakan cita-cita sejak dulu. Menurutnya Perda Nomor 6 Tahun 2003 harus betul-betul direalisasikan (Jajak co, 2020). Beliau (Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman. Red) siap memekarkan Pamekasan. (Tribunnews, 2020).

2. Persyaratan Dasar Kewilayahan

UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah bahwa Pembentukan Daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Persyaratan dasar pemekaran daerah meliputi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah. Persyaratan dasar kewilayahan

meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah dan batas usia minimal daerah kabupaten/kota dan kecamatan.

Wilayah Kabupaten Pamekasan seluas 79.230 Ha. Kecamatan terluas adalah Batumarmar 9.707 ha atau sekitar 12,3% dari luas wilayah keseluruhan, dan yang paling kecil adalah Kecamatan Pamekasan yakni 2.647 ha (3,3%) dari luas wilayah secara keseluruhan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 916.606 jiwa pada tahun 2019 yang terdiri atas 452.895 jiwa penduduk laki-laki dan 463.711 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sebesar 97,67. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 97 hingga 98 penduduk laki-laki (BPS, 2020). Kepadatan penduduk di Pamekasan tahun 2019 mencapai 1.256,89 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Pamekasan sebesar 3.577,94 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Pasean sebesar 799,14 jiwa/km² (BPS, 2020).

Kabupaten Pamekasan merupakan satu diantara empat kabupaten di Pulau Madura. Wilayah Kabupaten Pamekasan bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep, bagian selatan berbatasan dengan Selat Madura, dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Wilayah ini terletak pada 113°19' – 113°58' Bujur Timur dan 6°51' – 7°31' Lintang Selatan, dengan ketinggian berkisar antara 6-312 meter dari permukaan laut (dpl). Ketinggian wilayah yang cukup bervariasi tersebut, menyebabkan masing-masing kecamatan memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi potensi maupun mata pencaharian penduduknya.

Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 13 kecamatan yang meliputi 178 desa dan 11 kelurahan. Pembagian kecamatan-kecamatan di seluruh Kabupaten Pamekasan sesuai dengan kondisi dan karakteristik kegiatan dibedakan menjadi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang. Istilah Pamekasan dikenal pada abad ke-16, ketika Ronggosukowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Kraton Labangan Daja ke Kraton Mandilaras. Memang belum cukup

bukti tertulis yang menyebutkan proses perpindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi perubahan nama wilayah ini. Begitu juga munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 menetapkan provinsi yang akan dimekarkan harus sudah berusia minimal 10 tahun, sedangkan kota dan kabupaten harus sudah berusia minimal 7 tahun. Sementara pada Tanggal 3 November 2020 merupakan hari jadi Pamekasan yang ke 490, yang menunjukkan bahwa batas usia minimal daerah Kabupaten sudah sangat memenuhi persyaratan yang tercantun dalam peraturan tersebut.

3. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

Persyaratan dasar kapasitas daerah adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Parameter geografi meliputi lokasi ibu kota, hidrografi, dan kerawanan bencana. Lokasi ibu kota Kabupaten Pamekasan saat ini berada di Kecamatan Pamekasan. Adapun direncanakan ibu kota untuk masing-masing wilayah pemekaran:

Kota Pamekasan : Kecamatan Pamekasan bisa dijadikan sebagai pusat pemerintahan kota Pamekasan, karena sarana dan prasarana sudah mendukung, karena wilayah ini sebelumnya sebagai ibukota kabupaten Pamekasan. Terletak di wilayah selatan. Dengan luas wilayah 26,47 km².

Kabupaten Pamekasan: Kecamatan Waru bisa dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pamekasan, karena sarana dan prasarana cukup mendukung (1) Akses mudah dijangkau baik wilayah tengah maupun utara (2) sebagai salah satu pusat perdagangan di wilayah pamekasan (3) Terletak ditengah antara wilayah bagian utara dan wilayah bagian tengah. Kecamatan Waru terletak di wilayah bagian utara dan berada di daerah dataran tinggi, letak wilayah rata-rata 127 meter dari permukaan air laut. Populasi penduduk kecamatan Waru yang berjumlah lebih 66,9 ribu jiwa merupakan salah satu yang terpadat di Kabupaten Pamekasan.

Hidrografi, didalam dokumen Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pamekasan (KKP,2010), kawasan

untuk perikanan tangkap meliputi subzona penangkapan ikan pelagis dan subzona penangkapan ikan demersal. Kawasan perikanan budidaya meliputi: (a) Kawasan perikanan budidaya air payau yang terdapat di Kecamatan Pandemawu, Galis dan Larangan. Usaha perikanan air payau kegiatan pokoknya berupa usaha budidaya bandeng dan udang. Pengembangan usaha budidaya bandeng dan udang ini dilakukan pada saat musim penghujan di lahan tambak. (b) kawasan budidaya rumput laut yang terdapat di Kecamatan Pademawu. Didalam dokumen Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Pamekasan (KKP,2010), kawasan untuk perikanan budidaya meliputi zona budiaya rumput laut, zona tambak udang, zona budidaya kepiting, zona KJA kerapu dan zona tambak bandeng.

Kerawanan bencana, hampir seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan dilalui sungai yang merupakan kawasan rawan banjir dengan luasan kurang lebih 21288 Ha. Dibagian Selatan terdapat 2 sungai besar: Sungai Tarokan dan Sungai Majungan. Lahan pertanian yang memanfaatkan air dari sungai Tarokan tersebar di kecamatan Pademawu. Lahan pertanian yang memanfaatkan air dari sungai Majungan tersebar di kecamatan Proppo dan kecamatan Pamekasan. Di bagian utara wilayah Kabupaten Pamekasan terdapat 2 sungai besar, yaitu: Sungai Pasean dan Sungai Tamberu.

Kawasan rawan abrasi pantai di Kabupaten Pamekasan meliputi (a) Bagian utara terdapat di Desa Sotabar, Tlonto Raja, Batukerbuy, dan Bindang Kecamatan Pasean dan Desa Tamberu, Blaban, Kapong, Lesong Daya Kecamatan Batumarmar (b) Bagian selatan terdapat di Desa Montok Kecamatan Larangan, Desa Bandaran, Kramat dan Ambat Kecamatan Tlanakan.

Parameter demografi meliputi: kualitas SDM dan distribusi penduduk. Kualitas sumber daya manusia dirujuk dari Indeks pembangunan Manusia (IPM). Peringkat posisi IPM kabupaten di Pulau Madura yakni: Kabupaten Sampang berada pada posisi 38 atau yang paling rendah di provinsi jawa timur yakni 62, 70 pada tahun 2020. Kabupaten Bangkalan berada pada posisi 37 yakni 64, 70 pada tahun 2020. Kabupaten Pamekasan berada pada posisi 34 yakni 66,26 pada tahun 2020. Kabupaten Sumenep berada pada posisi 32 yakni 66, 43 pada tahun 2020 (BPS,

2020). Sari et al., (2019) Level IPM secara rata-rata di Pulau Madura berada pada kategori “sedang”, namun IPM Kabupaten Sampang justru berada pada kategori “rendah”.

Tabel 1. IPM masing-masing kabupaten di Pulau Madura 2014-2019

Kabupaten	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Rataan
Pamekasan	62.66	63.10	63.98	64.93	65.41	65.94	64.34
Sumenep	61.43	62.38	63.42	64.28	65.25	66.22	63.83
Bangkalan	60.71	61.49	62.06	62.30	62.87	63.79	62.20
Sampang	56.98	58.18	59.09	59.90	61.00	61.94	59.52
	60.445	61.29	62.14	62.85	63.63	64.47	62.47

Sumber: BPS (2014-2019)

Distribusi penduduk dapat dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Pamekasan yaitu sebesar 916.606 jiwa pada tahun 2019 yang terdiri atas 452.895 jiwa penduduk laki-laki dan 463.711 jiwa penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sebesar 97,67. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 97 hingga 98 penduduk laki-laki (BPS, 2020).

Kepadatan penduduk di Pamekasan tahun 2019 mencapai 1.256,89 jiwa/km². Angka kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Pamekasan sebesar 3.577,94 jiwa/km² dan kepadatan terendah di Kecamatan Pasean sebesar 799,14 jiwa/km² (BPS, 2020). Penduduk Kabupaten Pamekasan tersebar kedalam 227.752 rumah tangga. Rata-rata setiap rumah tangga di Kabupaten Pamekasan terdiri dari 3,9 anggota rumah tangga. Walaupun penduduk bertambah tiap tahun, namun penghuni setiap rumah tangga di Kabupaten Pamekasan selama lima tahun terakhir masih tergolong ideal, yaitu rata-rata 4 anggota rumah tangga.

Pada tahun 2019, sekitar 69,45% penduduk Pamekasan tergolong usia produktif (15-64 tahun) dan 30,55% usia non produktif (0-4 dan 65 tahun keatas). Dengan asumsi setiap penduduk usia produktif seluruhnya aktif secara ekonomi, maka Dependency Ratio penduduk Pamekasan sebesar 43,99%.

Keamanan. Tindak Kejahatan pertahun yang paling dominan adalah pengeroyokan, perkelahian, perjudiaan, penganiyaan ringan, dan perjudian dengan pemberatan serta pencurian kendaraan bermotor. Jumlah kejadian dari tindak kejahatan tersebut berkisar antara 11- 49 kali dalam satu tahun.

Konflik sosial, selama 10 tahun terakhir, konflik yang terjadi dalam bentuk konflik antar nelayan terkait perbatasan dalam hubungannya dengan area penangkapan ikan, demo terkait penambangan yang diprotes oleh penduduk setempat. Dengan kata lain tidak ada konflik sosial yang menyita perhatian nasional. Pernah ada konflik yang dimulai dari konflik antar keluarga berlanjut pada perselisihan dalam pemilihan pilkades yang berujung pada carok masal di Desa Bujur Kecamatan Tamberu.

Sosial politik, adat dan tradisi. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yakni tingkat partisipasi pemilih Pamekasan mencapai ≥ 90 persen pada pemilihan umum tahun 2019. (Tribunmadura.com, 2019). Untuk Tahun 2014 partisipasi warga Pamekasan dalam pemilihan presiden mencapai 75%. Terkait kohesivitas sosial yaitu tradisi yang masih melekat kuat pada sebagian besar masyarakat Madura, yakni tradisi hormat menghormati yang tercermin dalam falsafah Bhuppa' Bhabhu' Ghuru Rato. Sesukses bagaimanapun, orang Madura mesti tetap memelihara penghormatan terhadap figure-figur utama tersebut. (Susanto, 2007). Makna falsafah tersebut adalah menurut masyarakat Madura ada tiga (pihak) orang yang wajib ditaati, yakni bapak dan ibu (orang tua), guru (pendidik),. (Wardi, 2019) dan pemimpin negara atau pemerintahan karena pihak ini adalah penentu keteraturan dalam kehidupan dunia, yang berimplikasi terhadap kehidupan mereka di akhirat kelak (Achidsti, 2014).

Organisasi kemasyarakatan: Nahdlatul Ulama: ideologi Islam tradisional terlekat dalam struktur kognisi dan mental masyarakat Madura. (Hefni, 2013). Organisasi yang terkait dengan profesi. Seperti pokdarwis (kelompok sadar pariwisata), poklaksar (kelompok pengolah pemasar), kelompok tani, karang taruna, kelompok nelayan garam, dll.

Potensi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2019 sebesar 4,92 persen. Namun pertumbuhan ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,46 persen. Nilai PDRB atas dasar dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 17,04 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,13 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 15,91 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh

meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Pamekasan didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; serta kategori Konstruksi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Pamekasan pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kontribusi kategori ini mencapai 31,32 persen (angka ini lebih rendah dibanding tahun 2015 yang mencapai 35,84 persen). Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi antar tahunnya.

Potensi unggulan daerah. Komoditas unggulan strategis Wilayah Pamekasan adalah: garam, sapi Madura, tembakau, batik, bawang merah. Adapun Produk unggulan Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 dan 2018 dapat dilihat pada Tabel 2. Pariwisata. Tempat yang biasanya dikunjungi masyarakat dan menjadi mascot yaitu Pantai Jumiang, Pantai Talang Siring, Pantai batu Kerbuy, Api tak kunjung padam, monument arek lancor, Pasarean Batu Ampar, Makam Ki Ageng Joko Tarub, Museum Mandhilaras, Makam Ronggosukowati, Vihara Avalokitesvara, Goa Buatan.

Komoditas	Produksi		Sentra lokasi (kecamatan)
	2013	2018	
Bawang Manjung(ton) var.	13.976,8	186.998	Batumarmar, Pasean, Waru, Palengaan Proppo, Galis, Pademawu
Jagung (ton)	164.707,0	94.272	Batumarmar, Pasean, Palengaan, Waru, Kadur
Padi (ton)	164.988,0	104.659	Pademawu, Pakong, Waru, Proppo, Pegantenan
Tembakau (ton)	3.642,0	18.984	Pasean, Kadur, Pegantenan, Palengaan, Waru, Pakong
Jambu mente (ton)	58,3	439	Batumarmar, Waru, Pasean
Cabe rawit (ton)	20.444,6	266.394	Pegantenan, Waru, Larangan, Proppo, Palengaan,
Durian (ton)	2.292,1	24.714	Pegantenan
Kelapa (ton)	3.481,7	5.415	Kadur, Pegantenan
Garam (ton)	89.663,0		Galis, Pademawu, Tianakan
Cabe jamu (ton)	453,5	750.43	Larangan, Kadur, Pasean, Batumarmar, Palengaan
Rumput laut (ton)	312,3	103.990	Pademawu
Teri (ton)	5.247,0		Pademawu, Tianakan, Galis, Larangan
Sapi (ekor)	149.855,0	194.283	Waru, Pasean, Larangan, Batumarmar
Ayam Buras (ekor)	777.962,0	865.863	Pamekasan, Larangan, Pademawu, Tianakan
Ayam petelur (ekor)	312.840,0	484.000	Pakong, Larangan, Pasean, Tianakan
Batik tulis			Proppo, Pamekasan, Palengaan

Sumber: Bappeda, (2014; 2019; BPS, 2019)

Migas di kecamatan Pademawu, dilansir dari kabar Madura (2020) bahwa SKK Migas menargetkan produksi migas di Pamekasan

25 MMSCFD (25 juta kaki kubik per hari). Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap pembentukan PDRB Pamekasan relatif rendah. Selama 5 (lima) tahun terakhir, kontribusinya hanya sebesar 424,8 milyar rupiah atau sekitar 3,45 persen tahun 2015 dan meningkat menjadi 614,7 milyar rupiah atau sekitar 3,61 persen pada tahun 2019.

Keragaan yang melingkupi calon kota Pamekasan sebagai berikut: (1)kawasan sentra garam. Luas kawasan lahan tambak garam mencapai 2.036,37 ha dengan jumlah produksi tahun 2014 mencapai 130.242 ton. (2) sentra perdagangan. Kecamatan Pamekasan merupakan pusat perdagangan di wilayah Pamekasan. Sarana perdagangan yang mendominasi seperti pasar tradisional, pertokoan (toko kelontong), restoran, warung makan, mini market. Di Kecamatan Larangan terdapat pasar yang menjadi salah satu barometer dalam transaksi sapi di Pulau Madura (3)usaha perikanan kegiatan pokoknya berupa usaha budidaya bandeng, udang dan rumput laut. Produksi bandeng pada tahun 2013 mencapai 6,15 ton dan udang vanname pada tahun 2013 sebesar 497,17 ton (4)kawasan wisata. Tempat wisata yang cukup terkenal Api abadi atau api alam, Pantai Jumiang, Situs makam Pangeran Ronggosukowati, Vihara Avolokitesvara terbesar kedua di pulau Jawa, Makam Joko Tarub, Pantai talang siring dan Monumen kota. Sari et al, (2019) kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan Madura ditujukan untuk membentuk kota Industri dan Pariwisata, sesuai dengan tujuan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS) untuk menjadikan wilayah suramadu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi jawa timur (5)sentra padi.

Keragaan yang melingkupi calon Kabupaten Pamekasan adalah (1)di wilayah ini terdapat Kawasan Agropolitan. (2)sentra batik. Kabupaten Pamekasan memiliki potensi industri batik lumayan besar. Tahun 2014 tercatat jumlah pengusaha batik mencapai 66 perusahaan dan kapasitas produksinya sebanyak 359.121 kain per tahun. Persebarannya di Kecamatan Proppo, Palengaan, Waru, Pegantenan. Tahun 2016 mengalami peningkatan jumlah total pengusaha dan pengrajin sebanyak 1.691. (3)sentra bawang merah. Wilayah bagian utara merupakan sentra bawang merah (4)sentra sapi. Prioritas pengembangan

peternakan di Kabupaten Pamekasan adalah sapi Madura. Peternakan sapi di Madura memiliki fungsi sangat strategis dalam pembangunan ekonomi dan pertanian. Kabupaten Pamekasan dan beberapa kabupaten di Pulau Madura menjadi andalan Jawa Timur yang selama ini merupakan andalan pemasok ternak sapi ke beberapa wilayah konsumen di dalam negeri (5)Kecamatan Pasean memiliki komoditas unggulan dibidang perikanan tangkap dan olahan hasil perikanan. (6)kawasan agrowisata. Wilayah yang terletak di dataran tinggi menghasilkan beragam buah dan di dukung dengan view yang indah.

Keuangan daerah. Angka ketergantungan fiskal Kabupaten Pamekasan masih relatif tinggi. Hal ini tercermin dari proporsi dana perimbangan yang mencapai kisaran 64,49% di tahun 2014 hingga 68,03% di tahun 2018. Pada sisi lain perkembangan PAD memiliki kecenderungan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Sungguhpun begitu, pemekaran wilayah Pamekasan sebagai salah satu prasyarat pembentukan Provinsi di Madura selayaknya tidak hanya memperhatikan ketergantungan fiskal Kabupaten Pamekasan yang masih relatif tinggi.

KOMPONEN PENDAPATAN	TAHUN (%)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	11,23	10,12	9,76	12,76	12,07
Dana Perimbangan	64,49	62,66	71,18	70,16	68,03
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	24,29	27,22	19,06	17,07	19,90

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Pamekasan.

Belanja Kabupaten Pamekasan cukup ekspansif dengan tingkat kenaikan sebesar 8,75% rata-rata per tahun. Proporsi Belanja Tidak Langsung masih memiliki proporsi yang lebih besar dari Belanja Langsung. Kendati demikian, dari tahun ke tahun proporsi belanja tidak langsung mengalami penurunan meskipun masih berfluktuatif. Dari porsi belanja tidak langsung tersebut, pada tahun 2018 sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 67,99%, dan belanja bantuan keuangan sebesar 25,49%.

Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan. Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan yakni dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan, semua Kecamatan memiliki gedung Sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah, dan atas. Jumlah gedung 1.471, Jumlah guru 17.723 dan Jumlah Murid

sebanyak 178. 2780 (BPS (2020)). Untuk aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yakni tahun 2017 Di Kabupaten Pamekasan terdapat 6 rumah sakit yang terdiri dari 3 rumah sakit pemerintah, 2 rumah sakit swasta dan 1 rumah sakit bersalin. Tahun 2020 terdapat 4 Kecamatan yang memilik Rumah Sakit pemerintah, yaitu kecamatan Tlanakan, Pademawu, Pamekasan, dan Waru. (BPS, 2020). Terdapat 20 unit Puskesmas yang memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur yakni panjang jalan Kabupaten di Kab. Pamekasan Adalah 512 359 km. Panjang jalan raya yang tergolong dalam kondisi baik sebanyak 336.110 km, dalam kondisi sedang sebanyak 54.701 km, dan yang rusak sebanyak 121.548 km. Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Pamekasan (km), 2017–2018 adalah aspal untuk tahun 2017 adalah 510.859 km dan kerikil 1500 km. Jumlah pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sebanyak 6.843 orang. Dari jumlah tersebut 4.746 Pejabat Fungsional tertentu, 1.419 Pejabat Fungsional Umum, dan 678 adalah Pejabat Struktural (BPS, 2020).

Rencana tata ruang wilayah Pamekasan dan Wilayah Pemekarannya. Wilayah bagian selatan Pamekasan cocok untuk diplot sebagai Kota Pamekasan. Faktor yang menjadi pijakannya adalah wilayah bagian selatan dalam RTRW 2012-2032, sebagian besar sebagai kawasan perkotaan (urban) yakni fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Calon Kota Pamekasan bisa meliputi lima kecamatan yakni Kecamatan Pamekasan, Pademawu, Larangan, Tlanakan, dan Galis. Sementara kecamatan Proppo sebagai bagian wilayah selatan tidak perlu dimasukkan, karena kecamatan ini lebih bernuansa pedesaan. Usulan untuk Calon Kabupaten Pamekasan meliputi 8 kecamatan yakni Kecamatan Proppo, Waru, Kadur, Pasean, Batumarmar, Pegantenan, Pakong dan Palengaan. Wilayah ini sebagian besar sebagai kawasan perdesaan. Artinya aktifitas utamanya atau aktifitas ekonomi penduduknya bersandar pada pengelolaan

sumberdaya alam setempat atau pertanian dinamakan dengan kawasan perdesaan.

No	Uraian	Calon Kota Pamekasan	Calon Kabupaten Pamekasan
1	Jumlah Kecamatan	5 kecamatan	8 Kecamatan
2	kelurahan/desa	81 kelurahan/desa	108 desa
3	Luas wilayah	21.918 ha	57.312 ha
4	Jumlah dusun	471 dusun	723 dusun
5	Jumlah penduduk	341.435 jiwa	575.171 jiwa
6	Calon Pusat kota	Kecamatan Pamekasan.	Kecamatan Waru
7	Potensi utama	Garam, tembakau, perdagangan, padi, ikan teri, udang vanname, cabe merah	Sapi, batik, bawang merah, agrowisata
8	Keterangan (Merujuk RTRW Kab. Pamekasan 2012-2032)	Kawasan yang di plot sebagai perkotaan antara 47 - 100% dari kelurahan/desa yang dimiliki masing-masing dari 5 kecamatan diatas	kawasan yang di plot sebagai pedesaan jauh lebih besar daripada perkotaan.

Persyaratan Administratif. Persyaratan administratif untuk pembentukan Daerah kabupaten/kota belum dilaksanakan. Sungguhpun begitu, DPRD (Ketua DPRD) siap memekarkan Pamekasan (Tribunnews, 2020; Jajak co, 2020). Sebenarnya Persiapan Pemekaran sudah dilaksanakan 4 tahun sebelumnya, seperti dilansir oleh Radar Madura (2017). Salah satu syarat administrasinya adalah, harus ada lima kabupaten/kota di Madura. Sedangkan di Madura sampai saat ini masih empat kabupaten," kata Baddrut usai sidang paripurna di DPRD Pamekasan (Tribunnews, 2020). Dengan kata lain Bupati Pamekasan Baddrut Tamam belum memastikan kesepakatan terhadap Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNPPPM) yang akan mengupayakan Madura menjadi Provinsi (Jatim.santrinews, 2020).

D. REFERENSI

- Ali., S. M. (2018). Dampak Pemekaran Daerah Pada Pelayanan Publik Ditinjau Menurut Sistem Hukum Indonesia. *Petita*, Volume 3, Nomor 2, Januari-Juni 2018 .
- Bappeda. (2004). *Masterplan Agropolitan Kabupaten Pamekasan*. Kabupaten Pamekasan: Bappeda .
- Bappeda. (2011). *Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 – 2032*. . Bappeda : Kabupaten Pamekasan.
- Bappeda. (2014). *Penyusunan Masteplan Kampung Batik Kabupaten Pamekasan*. Kabupaten Pamekasan: Bappeda.
- Bappeda. (2014a). *Penyusunan Masteplan Kampung Batik Kabupaten Pamekasan*. Kabupaten Pamekasan: Bappeda .
- Bappeda. (2014b). *Profile komoditas unggulan Kabupaten Pamekasan*. Kabupaten Pamekasan: Bappeda .
- Bappeda. (2015). *Masterplan Minapolitan Kabupaten Pamekasan*. Kabupaten Pamekasan: Bappeda.
- Bappeda. (2016). *Profile one Village one product Kabupaten Pamekasan*. Kabupaten Pamekasan: Bappeda .
- Bappeda. (2019a). *Penyusunan One Village One Product Kabupaten Pamekasan*. Pamekasan: Bappeda .
- Bappeda. (2019b). *Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023*. Kabupaten Pamekasan: Bappeda.
- BPS. (2019). *Kabupaten Pamekasan dalam Angka*. Kabupaten Pamekasan: BPS .
- BPS. (2020a). *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur Tahun 2019, 17 Februari 2020*. BPS.
- BPS. (2020b). *Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2019*. BPS.
- BPS. (2020c). *Kabupaten Pamekasan dalam Angka*. Kabupaten Pamekasan: BPS.
- BPS. (2020d). *PDRB Kabupaten Pamekasan menurut lapangan usaha*. Kabupaten Pamekasan: BPS .
- BPWS. (2010). *Atlas Pariwisata Madura*. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. BPWS.
- Hefni, M. (2013). Islam Madura (Resistensi dan Adaptasi Tokoh Adat atas Penetrasi Kyai di Madura). *Analisis*, Volume XIII, Nomor 1, Juni 2013.
- Ida, L. (2005). *Permasalahan Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jakarta: Media Indonesia.
- Kabar Madura. 2020. <https://kabarmadura.id/skk-migas-targetkan-produksi-migas-di-pamekasan-25-mmscfd/> SKK Migas targetkan produksi migas di Pamekasan 25 MMSCFD. Diakses 13 januari 2021

- Kuntowijoyo. (2017.). Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940. . *IRCiSoD*.
- Kutsiyah, F. b. (2020). Kelekatan Modal Sosial Pada Keluarga Santri Di Pulau Madura. *Palita: Journal of Social Religion Research*, Vol.5, No.2, hal.183-203.
- Lubis, H. L. (2015). Membangun Madura: Strategi Menuju “Madura Madani. Vol 8.no 2.
- Nur, A. F. (2011). Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Pada Empat Kabupaten Di Pulau Madura. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 9 No. 1 Juli 2011.
- Nuraini, I. (2011). Transformasi Struktural & Pertumbuhan Ekonomi Empat Kabupaten di Wilayah Madura Tahun 2010-2019. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 9 No. 1 Juli 2011.
- Pandia. Agnesswetta. 2009. Menanti Warga Jatim Tak Miskin Lagi. Surabaya, Kompas, 16 Februari.
- Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah;
- Qurratu'ain, A. Q. (2016.). Analisis Indikator Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains Dan Seni ITS* , Vol. 5 No. 2. 2016.
- Susanto, E. (2007). Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura. *Karsa*. Vol. XII No. 2 Oktober 2007.
- Tauran. Tjitjik Rahaju, A. R. (2017). Pembentukan Provinsi Madura Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Cakrawala*, Vol. 11 No. 1 Juni 2017: 95 – 110.
- UNDP, B. &. (2007). *Studi Evaluasi Pemekaran Daerah, Building and Reinventing Decentralized Governance Project*. Bappenas Bekerjasama dengan UNDP.
- Wardi, I. d. (2019). Peran Kiai Dalam Rekonsiliasi Sosial Pasca Carok Massal Di Bujur Tengah Pamekasan Madura. *Ibda*, Vol. 17, No. 1.